



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH  
DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh:**

**M. Abid Dzulfikar**

**NIM 7101411354**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi,



Dr. Ade Rustiana, M. Si.

NIP. 19681021992031002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Margunani', is written above the name and NIP of the supervisor.

Dra. Margunani, M.P.

NIP 195703181986012001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Agustus 2015

Penguji I



Dr. Partono Thomas, M.S.  
NIP 195212191982031002

Penguji II




Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.  
NIP 198201302009121005

Penguji III



Dra. Margunani, M.P.  
NIP 195703181986012001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono, M. M.  
NIP. 195601031983121001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2015



M. Abid Dzulfikar  
NIM 7101411354

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Hiduplah dengan bangga, dan tanpa penyesalan (Portgas D. Ace – One Piece).

### **PERSEMBAHAN**

- Ibu Irmawati dan Ayah Lutfi Hakim
- Almamaterku
- Nonaku di masa depan

## PRAKATA

*Alhamdulillah*, tibalah pada titik ini, titik dimana sujud dan syukur saya abadikan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'aalaa* atas segala rencana yang Maha Rahasia, sehingga penyusun diberikan rasa sabar dan ikhlas untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal**”.

Proses ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Semakin waktu, proses kehidupan ini akan terus berucap terima kasih kepada mereka yang menghiasi mimpi dan janji kehidupan. Pada akhirnya, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tertinggi pada pihak-pihak dalam daftar panjang sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan FE Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini;
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian ini;
4. Dra. Margunani, M.P., Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Partono Thomas, M.S. yang telah memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
6. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si. yang telah memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan karyawan FE Unnes atas doa, bimbingan dan dukungannya;
8. Kepala Kesbangpolinmas, BAPPEDA, Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, dan SMA Negeri se-Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini;
9. Guru dan Tenaga Pendidikan SMA Negeri te-Kabupaten Kendal yang telah membantu peneliti ini;
10. Teman-teman “Kos Pink” atas ingatan untuk jangan lupa bahagia;
11. Anak-anak SDN Mojotengah, senyum dan ketulusan mereka menjadi alasan untuk terus belajar;
12. Teman-teman Pendidikan Akuntansi C 2011, KSEI, BEM FE Unnes, Sekolah Kader Bangsa, Forum Indonesia Muda 13, Komunitas Kecil Tapi Nyata, Tim 13, *Homeschooling* Primagama Semarang, yang sadar menikmati makna berbagi dan yang tak terpisahkan dalam membentuk diri saya yang sekarang.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan benar dan lancar;

Terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses pembuatan skripsi ini. Terimakasih untuk doa, harapan, dan dukungan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga kita semua bahagia. Aamiiiiin.

Semarang, Agustus 2015

Penyusun

## SARI

**Dzulfikar, M. Abid.** 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal*. Sarjana Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dra. Margunani, M.P.. 96.

**Kata Kunci:** Keuangan, Perencanaan, Realisasi, RAPBS, APBS.

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dan efisiensi padahal anggaran yang ada diterima dari berbagai sumber dan dikeluarkan untuk beberapa pos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Populasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri se-Kabupaten Kendal. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi tentang RAPBSMA dan Laporan Pertanggungjawaban APBSMA yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis biaya sekolah, analisis manfaat biaya pendidikan, analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan, dan analisis rasio keuangan.

Hasil penelitian diperoleh selisih rata-rata SPP Rp 26.645.- perbulan dan sumbangan pendidikan Rp 1.001.639.- pertahun. Jika semua biaya ditanggung siswa dalam menyelenggarakan pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Kendal Rp 568.619.- persiswa perbulan dengan harapan manfaat pendidikan yang akan diterima jauh lebih besar dari pada lulusan SMP. Rata-rata sumber dana pendidikan diperoleh 45.23% dari masyarakat, 33% APBD kabupaten, 20.22% APBN, dan 0.56% APBD provinsi. Rata-rata penggunaan dana pendidikan diperuntukkan 39% gaji PNS, 14% belanja langsung nonprogram dan 47% belanja program. Rata-rata Rasio Perhitungan Anggaran diperoleh 91.7% dan Rasio Pendapatan-Belanja 98.6%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan adil dan efisien dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah diharapkan mengeluarkan aturan mengenai format dalam menyusun RAPBS dan laporan Pertanggungjawaban APBS. Sekolah diharapkan mengklasifikasikan biaya sekolah berdasarkan jurusan dan jenjang kelas. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan sekolah. Wali murid diharapkan membayar biaya sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan.



## ABSTRACT

**Dzulfikar, M. Abid.** 2015. *Analysis of School Financial Management in all of Kendal State SHS*. Bachelor of Economic Education. Semarang State University. Dra. Margunani, M.P.. 96.

**Kata Kunci:** Finance, Planning, Realization, PSERB, SREB.

Schools have a duty to manage finances based on the principles of financial management regulations. School financial management in all Kendal State SHS are not yet fully applying the principle of fairness and efficiency whereas the budget is received from many sources dan spent for many items. This study aimed to determine how the planning and realization of budget in the school financial management.

The population in this study is all of Kendal State SHS. The datas were collected through documentation technique about PSERB and Accountability Report of SREB then analyzed descriptively with school cost analysis, cost benefit analysis of education, the analysis of sources and uses of funds for education, and financial ratio analysis.

The results is gotten that the average difference of tuition Rp 26.645.- permonth and the average difference of the educational donation Rp 1.001.639 per year. If all costs are incurred by students in conducting education of Kendal State SHS Rp 568.619.- per student per month with hope that the benefit will be higher than JHS graduates. The average of education sources is gotten that 45.23% from the society, 33% district Budget, 20.22% state Budget, and 0.56% provincial Budget. The average of educational budget using is 39% for salaries of civil servants, 14% nonprogram direct cost, and 47% program cost. The average of The Budget Calculation is gotten that 91.7% and The Expenditure-Revenue 98.6%.

Based on the results, planning and budget realization in the school financial management had been obediently done the rules fair and efficient. Suggestions that connected on the results are: The government is expected to issue rules about the format in preparing PSERB and Accountability Report of SREB. The school is expected to classify school cost based on majors and and school commites are expected to upgrade the quality in school finance management. The parent is expected to pay at the right time permonth.

## DAFTAR ISI

Isi	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TELAAH TEORI</b> .....	9
2.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah .....	9
2.2 Perencanaan .....	16
2.3 Realisasi Anggaran .....	20
2.4 Analisis Keuangan Sekolah .....	22

2.5 Kerangka Pemikiran Teoretis .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis dan Desain Penelitian .....	28
3.2. Populasi .....	28
3.3. Variabel Penelitian .....	29
3.4. Instrumen Penelitian .....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	33
4.2. Hasil Penelitian.....	35
4.2.1. Perencanaan .....	35
4.2.2. Realisasi anggaran .....	48
4.3. Pembahasan .....	51
4.3.1. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah.....	51
4.3.2. Realisasi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah ...	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1. Simpulan .....	63
5.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
3.1. Daftar SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal .....	28
3.2. Instrumen Penelitian .....	30
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	33
4.2. Keterangan RAPBS dan LPj APBS .....	34
4.3. Deskripsi Analisis Biaya SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal .....	35
4.4. Deskripsi Biaya Tingkat Satuan Pendidikan .....	38
4.5. Daftar Rincian Penggunaan Dana Pendidikan .....	44
4.6. Peruntukan Dana BOSMA .....	46
4.7. Deskripsi Rasio Keuangan SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Teoretis .....	27
4.1. Manfaat dan Biaya Jika Melanjutkan Pendidikan SMA.....	40
4.2. Sumber Dana Pendidikan SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal .....	41
4.3. Penggunaan Dana Pendidikan SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal...	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Observasi.....	68
2. Hasil Wawancara.....	71
3. Surat Izin Penelitian Unnes .....	77
4. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Kendal.....	79
5. Surat Izin Penelitian Bappeda Kendal .....	80
6. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal .....	82
7. Identifikasi Data Dokumen.....	83
8. Perhitungan Analisis Sumber dan Penggunaan Dana.....	85
9. Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terus-menerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Hal ini sejalan dengan konsepsi institusi pendidikan menengah yang telah dibentuk dalam manajemen sekolah untuk berkembang berdasar konsepsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam

pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Peneliti memfokuskan penelitian



ini pada pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah.

Sekolah menengah atas negeri sebagai salah satu institusi nirlaba pemerintah juga sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. Beberapa tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu institusi nirlaba pemerintah yaitu sekolah, juga diharuskan untuk mencari sumber keuangan dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendanaan pendidikan.

Pendanaan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal Bab XIII bahwa pendanaan

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 59 menerangkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga, dana yang dikelola oleh sekolah mengacu pada prinsip pengelolaan dana pendidikan guna mencapai kualitas pelayanan pendidikan yang optimal.

Kualitas pelayanan pendidikan bergantung pada baik buruknya pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan pengambilan data awal yang telah dilakukan di SMAN 1 Rowosari, masalah utama dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMAN 1 Rowosari berasal dari perencanaan, karena kehendak sekolah dan kehendak wali murid sering berbeda. Lebih lanjut, keadaan ekonomi wali murid yang menengah ke bawah membuat pihak sekolah tidak dapat sewenang-wenang dalam menentukan dana partisipatif yang telah dilakukan. Pihak sekolah perlu berpikir lebih jika terjadi penurunan siswa baru, karena dapat menyebabkan biaya operasional semakin membengkak. Hal serupa juga dialami oleh SMAN 1 Weleri dan SMAN 1 Kendal. SMAN 1 Weleri masih menemukan masalah dalam perencanaan pengelolaan keuangan sekolah, namun hal ini bisa diatasi dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sedangkan di SMAN 1 Kendal, anggaran pendapatan dan belanja sekolah-perubahan dilakukan apabila ada pengalokasian dana yang cukup besar pada unit tertentu dan belum

dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Di sisi lain, perencanaan pengelolaan keuangan sekolah bukan menjadi masalah utama bagi SMAN 1 Kendal. Dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah, terdapat dana partisipatif yang mana salah satu sumber pendapatan keuangan sekolah. Dana partisipatif yang berasal dari wali murid di tiga SMA Negeri di Kabupaten Kendal yaitu SMA Negeri 1 Kendal, SMA Negeri 1 Weleri, dan SMA Negeri 1 Rowosari tidak pernah terkumpul tepat waktu setiap bulannya. Keterlambatan dana partisipatif yang dibayarkan ke sekolah menjadi masalah serius bagi SMAN 1 Rowosari, karena dana kegiatan operasional sekolah banyak dibiayai oleh dana partisipatif masyarakat. Berkaitan dengan dana partisipatif yang dihimpun dari siswa SMAN 1 Kendal, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan SMA Negeri lain yang ada di Kabupaten Kendal. Hal ini berhubungan dengan efisiensi dari dana yang lebih banyak yang mana belum tentu menghasilkan produktivitas SMA yang lebih baik dibandingkan sekolah lain.

Pengelolaan keuangan yang terdapat di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal diduga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah khususnya prinsip keadilan, dan efisiensi. Misalnya, SPP yang dihimpun dari siswa dibayarkan dengan jumlah yang sama pada setiap jenjang kelas, padahal kebutuhan tiap jenjang kelas berbeda. Selain itu, bentuk kurangnya keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat dilihat dari anggaran dalam memberikan pelayanan yang lebih kepada siswa MIPA dibandingkan dengan siswa jurusan lainnya dalam bentuk laboratorium IPA, sedangkan siswa dari

jurusan lain tidak mendapatkan. Di sisi lain, bentuk kurangnya efisiensi pengelolaan keuangan sekolah dapat dilihat dari kebutuhan akan adanya fasilitas olahraga seperti kolam renang yang digunakan oleh siswa tidak dianggarkan, padahal kolam renang menjadi kebutuhan primer dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Gap fenomena ini juga selaras dengan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan sekolah.

Penelitian pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan oleh Hall (2007) menemukan bahwa telah terjadi *trade-off* efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Loubert (2008) yang menemukan bahwa penambahan pendanaan pendidikan meningkatkan kualitas sekolah yang ditandai dengan meningkatnya prestasi belajar siswa. Lebih lanjut, Wijaya (2009) menemukan bahwa pendidikan yang mahal tidak secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahara dan Maryati (2011), pengelolaan keuangan sekolah kelompok SMAN secara rata-rata sama baiknya dengan kelompok SMKN. Penelitian senada juga dilakukan oleh Hayati (2012) yang menemukan bahwa seringkali terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dengan realisasinya. Muhajirin (2012), pada studi kasusnya di SIT MI Luqman Al Hakim, menyimpulkan bahwa proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) telah sesuai dengan peraturan tentang pelaporan keuangan sektor publik.

Proses dalam pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi keadilan dan efisiensi. Penggunaan prinsip keadilan yang dimaksud ketika menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi ketika diterapkan secara internal berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah, maupun secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh siswa apabila siswa bersekolah. Berdasarkan permasalahan, teori, dan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kajian teori maupun hasil penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal.

2. Menganalisis realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu ekonomi dalam kajian teoretis bagi akademisi terkait pengelolaan keuangan sekolah di SMA.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan sekolah sehingga masyarakat dapat lebih kritis terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

- b. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengelolaan keuangan sekolah sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan sesuai dengan keadaan keuangan sekolah.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan sekolah.

## **BAB II TELAAH TEORI**

### **2.1. Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah yang menjadi salah satu bagian dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Suryana (2008) menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah.

Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orangtua atau peserta didik; (3) masyarakat (Suryana, 2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Menurut Mestry dan Tom (2009:3), pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Sutomo (2011:67) menjelaskan bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah menurut Bafadal (2004) dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (4) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Tujuan pelaksanaan manajemen keuangan sekolah adalah agar kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien serta mampu membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutomo, 2011:68). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan demi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah menengah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah merupakan keseluruhan aktivitas dalam mengatur keuangan sekolah dengan menerima dan membelanjakannya yang direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh entitas sekolah dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya guna menjalankan pelayanan pendidikan. Kemudian juga dijelaskan mengenai prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut.

### **2.1.1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mendalami prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **2.1.1.1. Keadilan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau

status sosial-ekonomi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan). Ikatan Akuntan Indonesia juga menjelaskan prinsip keadilan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007: paragraf 17) bahwa prinsip keadilan merupakan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Sedangkan bentuk pelaksanaan dari prinsip keadilan berupa (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia; (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan *thayyib*; (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata; (4) pertumbuhan dan stabilitas (Chapra dalam Al-Arif, 2011:72).

Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Kesempatan tersebut antara lain, (1) pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik, (3) kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam rangka pemerataan pendidikan yang berprinsip keadilan, sekolah juga diharuskan mengelola keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah MA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu (Petunjuk Teknis BOS MA 2014). Beberapa tujuan

diselenggaranya BOS MA adalah untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Selain itu, Program Ramah Sosial juga diamanatkan kepada sekolah berkualitas dengan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yaitu dengan aktif dalam mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, sekolah juga diamanatkan untuk melakukan mekanisme subsidi silang dan atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin.

Selain dana BOS, sekolah juga diamanatkan mengelola dana Bantuan Siswa Miskin. Bantuan Siswa Miskin merupakan amanat konstitusi yang diimplementasikan melalui kebijakan menyubsidi biaya pendidikan bagi siswa miskin. Tujuannya antara lain memberikan peluang bagi lulusan SMP dan sederajat untuk melanjutkan sekolah, mencegah siswa miskin putus sekolah, dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah (Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin SMA 2014).

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan landasan pengelolaan keuangan sekolah dalam merencanakan pendapatan, alokasi keuangan dan pemberian pelayanan yang optimal kepada siswa, guru, karyawan sebagai bentuk pemerataan

pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai prinsip efisiensi yang berkaitan dengan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah.

#### **2.1.1.2. Efisiensi**

Efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008). Efisiensi pada dunia pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai optimalisasi yang tinggi (Fattah, 2012:35). Halim (2012:133) mendefinisikan proses kegiatan operasional yang efisien jika suatu produk atau hasil kerja dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, prinsip efisiensi dapat diimplemetasikan dengan efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Fattah (2012:36) mengemukakan bahwa efisiensi internal akan menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimal. Efisiensi internal mengukur (1) rata-rata lama belajar yang dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu *kohort* (kelompok belajar) dibagi dengan jumlah lulusan dalam *kohort* tersebut dan (2) *input-output ratio* yang dihitung dengan membandingkan dengan siswa yang diluluskan dan siswa yang diterima dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan lulus. Perbandingan antara biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar sebagai konsep efisiensi internal juga menekankan pada pemberian rangsangan yang dapat memotivasi perilaku siswa, guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, Fattah

(2012:38) juga menjelaskan bahwa efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Selain dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, efisiensi eksternal juga dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Efisiensi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip tersebut.

## **2.2. Perencanaan**

### **2.2.1. Pengertian Perencanaan**

Kauffman (dalam Fattah, 2009:49) menjelaskan bahwa perencanaan sebagai proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dengan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Mulyono (2010:145) menguraikan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan berupa kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan tersebut berarti menghimpun segala sumber daya yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen

kegiatan. Daft (2010:7) menjelaskan bahwa perencanaan sebagai kegiatan mengidentifikasi segala tujuan tentang kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Fattah (2009:49) menambahkan bahwa perencanaan sebagai tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, serta siapa yang mengerjakannya. Sehingga, Koontz (dalam Fattah, 2009:49) menyimpulkan bahwa:

perencanaan sebagai proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu, dan dapat dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai beserta penggunaan sumber daya dengan memperhatikan keadaan di masa depan. Perencanaan terdiri dari berbagai jenis. Perencanaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

### **2.2.2. Jenis Perencanaan**

Daft (2010) mengemukakan bahwa rencana dapat dibagi menjadi tiga bagian yang disesuaikan dengan tujuannya. Berikut adalah jenis perencanaan berdasarkan tujuannya.

- 1) Rencana strategis, adalah cetak biru yang menentukan aktifitas dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan strategis dalam jangka waktu yang lama. Rencana strategis sekolah berupa rencana untuk mencapai visi sekolah.

- 2) Rencana taktis, adalah rencana yang dibuat untuk membantu mencapai rencana strategis dan mencapai bagian tertentu dari strategi dalam waktu menengah atau lebih pendek dari rencana strategis namun lebih lama dari rencana operasional. Rencana strategis sekolah berupa rencana untuk mencapai misi sekolah.
- 3) Rencana operasional, adalah rencana yang dibuat untuk melaksanakan tujuan operasional dan mendukung rencana taktis. Rencana operasional sekolah berupa rencana yang dibuat dalam jangka pendek. Rencana operasional sekolah tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tiap tahunnya.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh sekolah, terutama yang menyangkut keuangan sekolah yang mana diimplementasikan dalam bentuk RAPBS haruslah mengacu pada visi misi sekolah. Perencanaan juga memiliki manfaat. Manfaat perencanaan dijelaskan sebagai berikut.

### **2.2.3. Manfaat Perencanaan**

Daft (2010) mengemukakan bahwa perencanaan memiliki manfaat. Manfaat dari perencanaan yaitu (1) legitimasi, (2) sumber motivasi dan komitmen, (3) alokasi dan sumber daya, (4) panduan tindakan, (5) dasar pengambilan keputusan, dan (6) standar kinerja. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah memiliki manfaat legitimasi, alokasi sumber daya, dan dasar pengambilan keputusan. Perencanaan tersebut juga memerlukan sumber keuangan yang diatur dalam peraturan yang mana dijelaskan sebagai berikut.



#### **2.2.4. Sumber Keuangan Sekolah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat 4 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat bersumber dari:

- 1) Anggaran pemerintah;
- 2) Bantuan pemerintah daerah;
- 3) Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- 5) Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
- 6) Sumber lainnya yang sah.

#### **2.2.5. Implementasi Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Perencanaan keuangan sekolah diimplementasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disesuaikan dengan tujuan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Suryana (2008) menjelaskan bahwa anggaran merupakan formula dari rencana dalam periode waktu tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan sekolah untuk menyusun RAPBS, yakni rencana kerja tahunan yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun. Nata (2007) menjelaskan bahwa RAPBS adalah anggaran terpadu antara pendapatan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam

memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua yang dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa RAPBS sebagai bentuk implementasi perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi tiap sekolah. Selanjutnya, setelah teori perencanaan dikemukakan, juga dijelaskan teori mengenai realisasi anggaran.

### **2.3. Realisasi Anggaran**

#### **2.3.1. Penggunaan Keuangan Sekolah**

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS supaya mekanisme yang ditempuh secara benar, efektif, dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran dana pendidikan dalam biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian, juga dijelaskan bahwa biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi dalam satuan pendidikan berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RAPBS. Dalam kaitannya dengan realisasi anggaran, sekolah memerlukan pembukuan keuangan sekolah untuk membantu pelaporan keuangan sekolah.

### **2.3.2. Pembukuan Keuangan Sekolah**

Pembukuan keuangan sekolah atau yang lebih dikenal dengan penyelenggaraan akuntansi pendidikan bertujuan untuk menyediakan gambaran keuangan pada keseluruhan penyelenggaraan pendidikan (Bastian, 2006:90). Gambaran keuangan atau laporan keuangan pada entitas sekolah dijelaskan oleh Bastian (2006) dalam bentuk (1) laporan neraca yang berisikan data tentang aset, utang, dan modal; (2) laporan surplus defisit yang berisikan data tentang pendapatan, biaya, surplus atau defisit; (3) laporan arus kas yang berisikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Upaya sekolah dalam melaporkan keuangan sekolah memerlukan siklus akuntansi yang terdiri dari tiga tahap yaitu (1) tahap pencatatan; (2) tahap pengikhtisaran; dan (3) tahap pelaporan (Bastian, 2006).

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja sekolah harus melaksanakan manajemen keuangan sekolah dengan mengacu pada rencana APBS. Sekolah juga memerlukan suatu sistem akuntansi yang disesuaikan dengan entitas pendidikan dalam rangka menyediakan gambaran keuangan sekolah. Gambaran keuangan yang berupa laporan keuangan sekolah perlu untuk dianalisis sebagai cara dalam membaca laporan keuangan sekolah.

#### **2.4. Analisis Keuangan Sekolah**

Data keuangan dalam laporan keuangan perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran dari keuangan yang tercermin dari laporan keuangan yang bersangkutan (Thomas, 2011:109). Selanjutnya, Harahap (2008:190) menjelaskan bahwa,

analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, antara lain, baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Sedangkan Wild dan Halsey (2004:37) mendefinisikan analisis laporan keuangan sebagai aplikasi dari teknik dan alat analisis dari tujuan umum laporan keuangan dan menghubungkannya dengan hal-hal terkait dan kesimpulan yang bermanfaat. Laporan keuangan sekolah menunjukkan kinerja sekolah melalui kemampuan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, *Statement of Financial Accounting Concepts* Nomor 4 menyebutkan mengenai tujuan dari laporan keuangan organisasi nirlaba adalah:

- 1) bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional,
- 2) menilai pelayanan dan kinerja organisasi,
- 3) memberi penjelasan dan interpretasi,
- 4) memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan, kinerja selama satu periode, cara memperoleh kas, dan cara membelanjakan kas.

Sekolah sebagai organisasi nirlaba juga memiliki tujuan yang serupa dengan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba yang diungkapkan pada *Statement of Financial Accounting Concepts*. Tujuan laporan keuangan tersebut tidak dapat tercapai apabila *stakeholder* tidak mampu membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk membantu *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis berupa, (1) analisis biaya sekolah, (2) analisis manfaat biaya pendidikan, (3) analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan, dan (4) analisis rasio keuangan. Teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut.

#### **2.4.1. Analisis Biaya Sekolah**

Analisis biaya sekolah dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah (Bastian, 2006). Pada penelitian ini, biaya sekolah yang akan dianalisis adalah biaya yang berkaitan dengan siswa. Biaya sekolah terutama yang terkait dengan siswa perlu dihitung dan dianalisis untuk mengetahui besaran biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam bentuk dana partisipatif.

#### **2.4.2. Analisis Manfaat Biaya Pendidikan**

Analisis manfaat biaya berkembang sebagai landasan teoretis ilmu ekonomi kesejahteraan, terutama yang mengutamakan efisiensi (Pearce dalam Kuper, 2008). Kemudian, juga dijelaskan bahwa analisis manfaat biaya dilengkapi dengan pendekatan diskonto untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang berdasarkan nilai sekarang dan tingkat diskonto tertentu karena manfaat dan biaya yang cenderung terakumulasi. Selanjutnya, analisis manfaat biaya juga sesuai dengan perhitungan proyek dalam skala besar khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah (Sjafrizal, 2008). Analisis manfaat biaya pendidikan sering dihubungkan dengan efisiensi eksternal pendidikan (Fattah, 2012:38). Fattah (2012) juga menjelaskan bahwa analisis manfaat biaya pendidikan adalah rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis manfaat biaya adalah analisis yang digunakan dalam mengukur efisiensi dari proyek berdasarkan manfaat yang didapat dan biaya yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan nilai sekarang dan yang akan datang.

#### **2.4.3. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Pendidikan**

Analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan bertujuan untuk mengetahui pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Sugandi, 2011). Pola pendanaan pendidikan diperlukan diperlukan oleh pengelola sekolah, pengambil kebijakan pendanaan di tingkat pemerintah, dan pemangku kepentingan pendidikan kejuruan sebagai bahan rujukan untuk menentukan

strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di tingkat satuan pendidikan menengah yang berbasis pada aktifitas pembelajaran

#### **2.4.4. Analisis Rasio Keuangan**

Informasi yang ada dalam laporan keuangan sekolah merupakan dasar dalam menganalisis laporan keuangan dengan mengonversi data yang berasal dari laporan keuangan sekolah. Thomas (2011) menjelaskan bahwa menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang telah terjadi atau yang diperkirakan di masa depan, dan (2) membandingkan rasio-rasio keuangan dengan entitas sejenis. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan sekolah adalah cara untuk menginterpretasi keuangan sekolah dengan membandingkan suatu akun dengan lainnya untuk dianalisis dan diawasi guna mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan sekolah. Pada penelitian ini, dilakukan model analisis rasio laporan keuangan yang membandingkan rasio keuangan pada entitas sejenis di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal.

Rasio keuangan entitas nirlaba tidak menganalisis rasio keuangan yang berhubungan dengan laba. Rasio keuangan yang dianalisis dalam entitas nirlaba yaitu rasio keuangan yang berhubungan realisasi anggaran dan pendapatan-belanja sekolah.

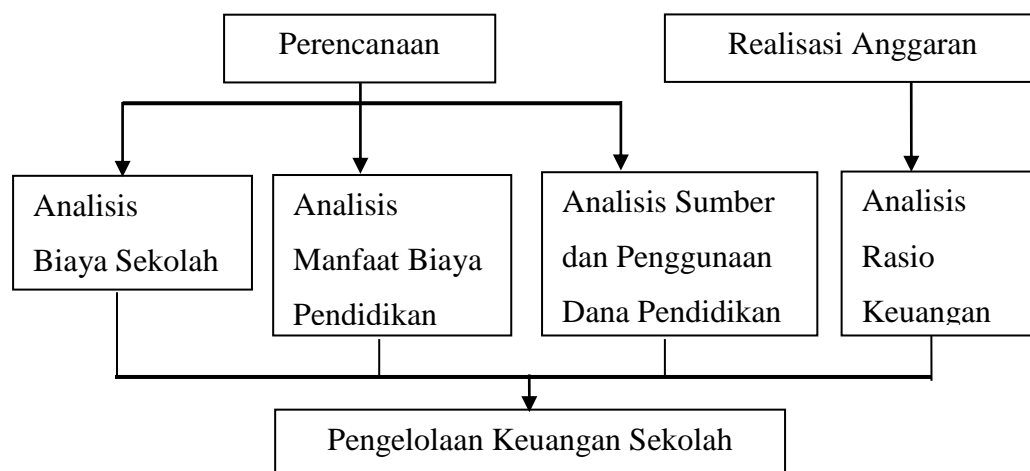
## **2.5. Kerangka Pemikiran Teoretis**

Pengelolaan keuangan sekolah memiliki proses yang harus dilalui, yaitu perencanaan, realisasi anggaran, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Peneliti menelaah pada perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah karena dua tahapan tersebut merupakan tahapan yang berkaitan secara langsung dengan laporan keuangan sekolah yang merupakan fokus peneliti dalam penelitian ini. Pengelolaan keuangan sekolah adalah proses menerima uang dan membelanjakan uang yang dilakukan oleh sekolah guna menjalankan pelayanan pendidikan. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai beserta penggunaan sumber daya dengan memperhatikan keadaan di masa depan dalam bentuk RAPBS. Realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RAPBS. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, prinsip keadilan dalam perencanaan pengelolaan keuangan sekolah dan prinsip efisiensi dalam realisasi anggaran pengelolaan keuangan sekolah dapat dieksplorasi untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah. Indikator pengelolaan keuangan sekolah sendiri memiliki empat indikator yaitu prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik. Prinsip tersebut berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan sekolah yang kemudian diambil untuk dijadikan sub-variabel, yaitu perencanaan dan realisasi anggaran yang diimplementasikan melalui RAPBS dan realisasi dari RAPBS tersebut. Jadi, letak perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih



memfokuskan penelitian pada laporan keuangan sekolah sebagai dasar dalam meneliti dengan pelaksanaan prinsip keadilan dan prinsip efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan sekolah pada tahapan perencanaan dan realisasi anggaran. Laporan keuangan sekolah penting untuk dianalisis karena dapat diketahui kelebihan dan kelemahan keuangan sekolah. Sub-variabel berupa perencanaan dianalisis melalui (1) analisis biaya sekolah, (2) analisis manfaat biaya pendidikan, dan (3) analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan. Ketiga analisis tersebut digunakan untuk mengeksplorasi perencanaan sekolah, dalam hal ini kaitannya dengan RAPBS. Sub-variabel berupa realisasi anggaran dianalisis melalui analisis rasio keuangan. Analisis tersebut digunakan untuk mengeksplorasi realisasi anggaran sekolah, dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan APBS. Keempat analisis tersebut digunakan untuk mengeksplorasi variabel tunggal, yaitu pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Teoretis**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2013:13). Data dalam penelitian ini akan diolah dan hasilnya berupa angka dengan alat pengolah datanya menggunakan *Microsoft Office Excel*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

### **3.2. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini sesuai dengan wilayah generalisasinya, yaitu SMA Negeri se-Kabupaten Kendal. Berikut adalah daftar SMA Negeri se-Kabupaten Kendal yang disajikan melalui Tabel 3.1..

**Tabel 3.1.  
Daftar SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal**

Nomor	Sekolah
1	SMAN 1 Kendal
2	SMAN 1 Rowosari
3	SMAN 2 Kendal
4	SMAN 1 Gemuh
5	SMAN 1 Weleri
6	SMAN 1 Singorojo
7	SMAN 1 Kaliwungu
8	SMAN 1 Boja
9	SMAN 1 Cepiring
10	SMAN 1 Limbangan
11	SMAN 1 Patean
12	SMAN 1 Pegandon
13	SMAN 1 Sukorejo
14	SMAN 2 Sukorejo

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tahun 2015

### **3.3. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan aktivitas dalam mengatur keuangan sekolah yang direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh entitas sekolah dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Adapun sub-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **3.3.1. Sub-Variabel**

Penelitian ini terdapat 2 sub-variabel yaitu:

- 1) Perencanaan, adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai beserta penggunaan sumber daya dengan memperhatikan keadaan di masa depan dalam bentuk RAPBS.
- 2) Realisasi anggaran, adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RAPBS.

### **3.4. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini terdapat dalam RAPBSMA Negeri se-Kabupaten Kendal, Laporan Pertanggungjawaban APBSMA se-Kabupaten Kendal dan teori yang relevan. Berikut penjelasan dari instrumen penelitian ini yang disajikan melalui Tabel 3.2..

**Tabel 3.2.**  
**Instrumen Penelitian**

<b>Nomor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ukuran</b>
1	SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Sumbangan berupa dana yang dikeluarkan oleh walimurid untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu instansi pendidikan.	Rupiah
2	Biaya Langsung	Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan organisasi.	Rupiah
3	Biaya Rutin Langsung	Biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun.	Rupiah
4	Siswa	Komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.	Jiwa
5	Sumbangan pendidikan	Sumbangan berupa dana yang dikeluarkan oleh walimurid untuk pembinaan pendidikan lebih lanjut untuk mendanai keperluan Biaya Tidak Langsung yang berada dalam suatu instansi pendidikan.	Rupiah
6	Biaya Tidak Langsung	Komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen Biaya Langsung.	Rupiah
7	Manfaat biaya pendidikan	Manfaat yang diterima ketika menempuh proses pendidikan dan biaya yang dikeluarkan ketika melakukan proses pendidikan.	Rupiah
8	Gaji	Kompensasi yang diterima ketika bekerja.	Rupiah
9	<i>Rate of return to education</i>	Pengembalian atau manfaat yang diterima setelah menempuh proses pendidikan.	Rupiah
10	<i>Earning forgone</i>	Jumlah rata-rata penghasilan tamatan SMP selama bersekolah SMA.	Rupiah
11	Sumber dana pendidikan	Komponen sumber dana pendidikan yang diterima oleh sekolah.	Rupiah/ Pos sumber dana
12	Penggunaan Dana Pendidikan	Komponen penggunaan dana pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah.	Rupiah/ Pos pengeluaran dana
13	Anggaran	Jumlah dana yang direncanakan untuk diterima dan dikeluarkan oleh sekolah.	Rupiah
14	Realisasi	Jumlah dana yang benar-benar diterima dan dikeluarkan oleh sekolah.	Rupiah
15	Pendapatan sekolah	Jumlah dari dana yang diterima oleh sekolah.	Rupiah
16	Belanja sekolah	Jumlah dari dana yang dikeluarkan oleh sekolah.	Rupiah

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang RAPBSMA Negeri se-Kabupaten Kendal, jumlah siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan SMA Negeri se-Kabupaten Kendal.

### 3.6. Analisis Data

#### 3.6.1. Analisis Biaya Sekolah

Bastian (2006: 143) mengemukakan perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui besaran biaya yang dalam kebutuhan langsung/riil siswa secara umum dengan rumus sebagai berikut.

$$SPP \text{ rata - rata} = \frac{\text{Biaya Langsung} - \text{Biaya Rutin Langsung}}{\text{Jumlah Siswa}}$$

Selain itu, Bastian (2006: 144) juga menyatakan perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui sumbangan pendidikan atau istilah lainnya dalam membiayai keperluan tidak langsung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Sumbangan Pendidikan (SP)} = \frac{\text{Biaya Tidak Langsung yang akan dibiayai SP}}{\text{Jumlah Siswa}}$$

#### 3.6.2. Analisis Manfaat Biaya Pendidikan

Penelitian ini menggunakan model analisis manfaat biaya investasi pendidikan (Fattah, 2012:26). Model analisis manfaat biaya investasi pendidikan membandingkan seberapa besar manfaat pendidikan pada jenjang relatif terhadap

biaya yang dikeluarkan dengan asumsi bahwa pasar tenaga kerja bersifat kompetitif penuh.

### 3.6.3. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Pendidikan

Sugandi (2011) menyebutkan bahwa analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Analisis sumber dan penggunaan dana pendidikan dilakukan dengan (1) melakukan identifikasi sumber pendanaan dan pembiayaan, (2) melakukan kajian empiris dengan menganalisis komponen pembiayaan, (3) menghitung besaran belanja berdasarkan hasil identifikasi dan pengelompokan belanja, dan (4) menentukan pola pendanaan pendidikan (Sugandi, 2011:133).

### 3.6.4. Analisis Rasio Keuangan

Rasio Perhitungan Anggaran menggambarkan pencapaian target selama satu tahun anggaran (Prasetya, 2005:51). Selanjutnya, Prasetya (2005) mengemukakan rumus Rasio Perhitungan Anggaran sebagai berikut.

$$\text{Rasio Perhitungan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}}$$

Kemudian, Prasetya (2005) juga menjelaskan mengenai Rasio Pendapatan-Belanja. Rasio ini bertujuan untuk menjaga kondisi keuangan sekolah untuk membiayai belanja operasional sekolah (Prasetya, 2005). Selanjutnya, Prasetya (2005) mengemukakan tentang rumus perhitungan rasio pendapatan-belanja sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pendapatan - Belanja} &= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Sekolah}}{\text{Total Belanja Operasi}} \\ &= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Sekolah}}{\text{Total Belanja}} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \end{aligned}$$

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang diimplementasikan melalui RAPBSMA Negeri se-Kabupaten Kendal dilakukan dengan adil dan mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah yang dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban APBSMA Negeri se-Kabupaten Kendal dilakukan secara efisien dan mematuhi peraturan yang berlaku.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, saran yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan mengeluarkan aturan mengenai format dalam menyusun RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban APBS;
2. Sekolah diharapkan mengklasifikasikan biaya sekolah berdasarkan jurusan dan jenjang kelas;
3. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam mengelolaa keuangan sekolah;
4. Wali murid diharapkan mampu membayar biaya sekolah tepat waktu setiap bulannya;

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Terjemahan Tita Maria Kanita. Jakarta: Salemba Empat. Terjemahan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2014. *Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBN Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan SMA. 2014. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fattah, Nanang. 2012a. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remada Rosdakarya Offset.
- 2012b. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Financial Accounting Standards Board. 2008. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 4 (amended) Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations*.
- Halim, A. dan Muhammad Syam K. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, Joshua. 2007. "Local School Finance and Productive Efficiency: Evidence from Ohio". Dalam *International Atlantic Economic Society*, 35:289-301. © Springer 2007.
- Harahap, Sofyan Safri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hayati, Endah Dwi. 2012. "Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak". Dalam *Educational Management Journal*. Volume 1 Nomor 2 Hal 143-149.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.



- Loubert, Linda. 2008. "Increasing Finance, Improving Schools". Dalam *Springer Science + Business Media LLC*, 35: 31-41. © Springer 2008.
- Mestry, Raj dan Tom Bisschoff. 2009. *Financial School Management Explained*. Cape Town: Pearson Education South Africa.
- Muhajirin. 2012. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat". Dalam *Educational Management Journal*, Volume 1 Nomor 2. Hal 170-175. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nata, Abuddin. 2007. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2008. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Seputar Kota Kendal. 2013. 87 SLTA (SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta di Kendal. <http://seputarkotakendal.blogspot.com/2013/04/80-sлта-smasmkma-negeri-dan-swasta-di.html> (22 Maret 2015).
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Niaga Swadaya.
- Sugandi, Machmud. 2011. "Pola Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Program Studi Keahlian Teknik Bangunan". Dalam *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, Volume 34 Nomor 2. Hal 129-140. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryana, Deden. 2008. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Erlangga.
- Sutomo. 2011. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UPT Unnes Press.
- Thomas, Partono. 2011. *Dasar Manajemen Keuangan*. Semarang: Unnes Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wijaya, David. 2009. “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan”. Dalam *Jurnal Pendidikan Penabur*, Nomor 13 Tahun ke 8. Hal 80-96.
- Wild, John J. dan Robert Halsey. 2004. *Financial Statement Analysis*. MC Graw Hill.
- Zahara dan Ulfi Maryati. 2011. “Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN)”. Dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Volume 6 Nomor 1. Hal 78-86. Padang: Politeknik Negeri Padang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
FAKULTAS EKONOMI (FE)

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran ( Pati, Semarang,  
Telp/Fax. (024) 8508015, website : [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id)

Nomor : 85 /UN37.L7/PP/2015  
Hal : Ijin Observasi

9 Januari 2015

Yth. Kepala SMA N 1 Kendal  
Jl. Soekarno-Hatta  
Kendal

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

Nama : M Abid Dzulfikar  
NIM : 7101411354  
Jur./Konsentrasi : Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi

Bermaksud akan melakukan observasi di SMA N 1 Kendal guna keperluan data awal penulisan skripsi. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan observasi di Sekolah yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu Bulan Januari 2015 s/d selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

a.n. Dekan  
Bumantu Dekan Bidang Akademik



Tembusan Yth.:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Pend. Ekonomi  
Fakultas Ekonomi UNNES

FM-05-AKD-24



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
FAKULTAS EKONOMI (FE)

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,  
Telp/Fax. (024) 8508015, website : <http://fe.unnes.ac.id>

Nomor : 85 /UN37.L.7/PP/2015  
Hal : Ijin Observasi

3 Januari 2015

Yth. Kepala SMAN 1 Weleri  
Jl. Bahari No. 17 Karanganom, Kec. Weleri  
Kendal

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

Nama : M Abid Dzulfikar  
NIM : 7101411354  
Jur./Konsentrasi : Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi

Bermaksud akan melakukan observasi di SMA N 1 Kendal guna keperluan data awal penulisan skripsi. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan observasi di Sekolah yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu Bulan Januari 2015 s/d selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Bebantu Dekan Bidang Akademik



Meri Yanto, MBA, PhD  
NIP. 196307181987021001

Tembusan Yth.:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Pend. Ekonomi  
Fakultas Ekonomi UNNES

FM-05-AKD-24



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
FAKULTAS EKONOMI (FE)  
Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,  
Telp/Fax. (024) 8508015, website : <http://fe.unnes.ac.id>

Nomor : 85 /UN37.L.7/PP/2015  
Hal : Ijin Observasi

3 Januari 2015

Yth. Kepala SMAN 1 Rowosari  
Jl. Bahari KM 5 Kec. Rowosari  
Kendal

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

Nama : M Abid Dzulfikar  
NIM : 7101411354  
Jur./Konsentrasi : Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi

Bermaksud akan melakukan observasi di SMA N 1 Kendal guna keperluan data awal penulisan skripsi. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan observasi di Sekolah yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu Bulan Januari 2015 s/d selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Bebantu Dekan Bidang Akademik



Meri Yanto, MBA, PhD  
NIP. 067181987021001

Tembusan Yth.:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Pend. Ekonomi  
Fakultas Ekonomi UNNES

FM-05-AKD-24

## Lampiran 2 Hasil Wawancara

Narasumber : Pak Sulus (Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Rowosari)

Tanggal : 11 Februari 2015

*Pertanyaan : Adakah masalah dalam perencanaan dan realisasi anggaran pengelolaan keuangan sekolah ?*

Jawaban : Seringkali, masalah dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahapan perencanaan. Hal ini disebabkan sumber dana yang terhimpun dari orangtua atau wali tidak dapat ditentukan sewenang-wenang, terlebih apabila jumlah siswa yang diterima turun daripada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada SPP seringkali tidak terkumpul tepat waktu setiap bulannya, bahkan hingga pada akhir tahun ajaran.

*Pertanyaan : Lalu, untuk tahapan pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah, apakah ada masalah?*

Jawaban : Tidak ada. Lancar-lancar saja.

*Pertanyaan : Selanjutnya, Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan keuangan sekolah?*

Jawaban : Transparansi selalu digunakan dalam pengelolaan keuangan sekolah karena RAPBS memerlukan persetujuan dari walimurid dalam pengesahannya. Sehingga, diadakan rapat pleno yang mengundang seluruh elemen sekolah guna membahas RAPBS yang telah disusun oleh Komite Sekolah.

Keadilan diimplementasikan melalui pembebasan sebagian atau keseluruhan jumlah SPP yang dibayar yang ditarik berdasarkan

kemampuan ekonomi dari walimurid. Walaupun, pembebasan ini banyak didasari pada kuosioner yang diisi oleh siswa karena keterbatasan sumber daya.

*Pertanyaan* : *Bagaimana kompensasi yang diterima oleh siswa ilmu-ilmu sosial dalam KBM dibandingkan siswa jurusan matematika dan ilmu alam ?*

*Jawaban* : Ketika dalam KBM, siswa ilmu-ilmu sosial belum mendapatkan laboratorium khusus dibandingkan dengan siswa matematika dan ilmu alam. Namun, hal ini diantisipasi dengan kunjungan ke museum, industri tiap tahunnya.



Narasumber : Pak Waluyo (Guru dan Pengurus Komite SMAN 1 Weleri)

Tanggal : 11 Februari 2015

*Pertanyaan : Adakah masalah dalam perencanaan dan realisasi anggaran pengelolaan keuangan sekolah ?*

Jawaban : Seringkali terjadi perubahan RAPBS ketika diadakan rapat pleno dengan orangtua siswa terkait usulan kegiatan yang belum ada dalam RAPBS. Begitu pula, Perubahan terjadi dalam APBS, yang disebut dengan APBS Perubahan, yang mana dilakukan apabila ditengah-tengah tahun ajaran berjalan terjadi perubahan.

Selanjutnya, untuk realisasi dalam SPP, seringkali tidak terkumpul tiap bulannya, walaupun ketentuannya harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulannya. Namun, SPP tersebut pasti lunas untuk tiap tahun ajaran.

*Pertanyaan : Lalu, untuk tahapan pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah, apakah ada masalah?*

Jawaban : Lancar-lancar saja.

*Pertanyaan : Selanjutnya, Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan keuangan sekolah?*

Jawaban : Dilakukan pembedaan jumlah dari SPP yang dibayarkan berdasarkan faktor ekonomi.

Transparansi dilakukan apabila ada orangtua siswa membutuhkan kejelasan mengenai pengelolaan keuangan sekolah dengan orangtua siswa datang langsung ke sekolah. Biasanya terjadi setelah rapat pleno disampaikan.

*Pertanyaan* : Bagaimana kompensasi yang diterima oleh siswa ilmu-ilmu sosial dalam KBM dibandingkan siswa jurusan matematika dan ilmu alam ?

*Jawaban* : Karena kurikulum yang diterapkan demikian, maka tidak ada kompensasi terhadap siswa jurusan ilmu-ilmu sosial. Namun, sekolah mengadakan *study tour* ke perusahaan yang dilakukan ketika siswa kelas XI tiap tahunnya. Itupun dilakukan bagi semua siswa MIA dan IIS.

Narasumber : Bu Istiana (Sekretaris Tata Usaha SMAN 1 Kendal)

Tanggal : 11 Februari 2015

*Pertanyaan : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan ?*

Jawaban : Pihak kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarpras yang akan melakukan permohonan dana diharuskan untuk membuat proposal yang diajukan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan ke bendahara sekolah. Kemudian, pihak yang memohon dana diharuskan untuk membuat LPJ paling lama satu minggu setelah kegiatan.

*Pertanyaan : Adakah masalah dalam perencanaan dan realisasi anggaran pengelolaan keuangan sekolah ?*

Jawaban : Tidak ada masalah, karena sudah ada RAPBS. Walaupun, kadang terjadi perubahan dalam RAPBS apabila dibutuhkan dan memerlukan penggunaan dana yang besar. Begitu pula dalam realisasi pendapatan SPP, seringkali tidak terkumpul setiap bulannya, meskipun hal ini masih bisa diatasi.

*Pertanyaan : Lalu, untuk tahapan pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah, apakah ada masalah?*

Jawaban : Kadang terjadi masalah teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

*Pertanyaan : Selanjutnya, Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan keuangan sekolah?*

Jawaban : Kalau ada siswa kurang mampu, bisa mengajukan permohonan keringanan biaya sekolah, baik dilakukan awal maupun di tengah tahun ajaran. Transpransi dilakukan tiap kali rapat pleno.

*Pertanyaan : Bagaimana kompensasi yang diterima oleh siswa ilmu-ilmu sosial dalam KBM dibandingkan siswa jurusan matematika dan ilmu alam ?*

Jawaban : Tiap tahunnya, siswa melakukan lawatan sejarah yang dibimbing oleh guru Sejarah.

## Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Unnes



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
FAKULTAS EKONOMI (FE)**

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,  
Telepon(Fax.) 8508015  
e-mail : fe@unnes.ac.id

Nomor : 1609/UN37.1.7/PP/2015  
Hal. : **Ijin Penelitian**

8 Juni 2015

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal  
Jl. Pramuka No.5  
Kendal**

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

Nama : M. Abid Dzulfikar  
NIM : 710 141 1354  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Ekonomi/Pend. Koperasi

Bermaksud akan menyusun skripsi dengan judul : "**analisis Pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal**"

Berkeinginan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dengan alokasi waktu bulan **Juni 2015 sampai dengan selesai.**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

  
 Dit. Dekan,  
 Pembantu Dekan Bid. Akademik.,  
**Drs. Heri Yanto, MBA., PhD.**  
 NIP. 196307181987021001

Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Unnes

FM-05-AKT-24



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**  
**FAKULTAS EKONOMI (FE)**  
 Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,  
 Telepon(Fax.) 8508015  
 e-mail : fe@unnes.ac.id

Nomor : 1609/UN37.1.7/PP/2015  
 Hal. : Ijin Penelitian

8 Juni 2015

**Yth. Kepala SMA N**  
**Se-Kabupaten Kendal (terlampir)**

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

**N a m a** : M. Abid Dzulfikar  
**N I M** : 710 141 1354  
**Jurusan/Prodi** : Pendidikan Ekonomi/Pend. Koperasi

Bermaksud akan menyusun skripsi dengan judul : "analisis Pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal"

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan penelitian di SMA N Kendal dengan alokasi waktu bulan Juni 2015 sampai dengan selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih



Dekan,  
 Pembantu Dekan Bid. Akademik.,

**Drs. Heri Yanto, MBA., PhD.**  
 NIP. 196307181987021001

Tembusan :  
 1. Dekan  
 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi  
 Fakultas Ekonomi Unnes

FM-05-AKD-24

## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Kendal



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Soekarno - Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284 Kode Pos 51313  
 E-mail : kesbangpol@kendalkab.go.id

### TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070 / 772 / VI / 2015

Telah terima 1 ( Satu ) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey atas nama :

- Nama : M. ABID DZULFIKAR
- Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang
- Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
- Tujuan : *Mengadakan Penelitian dengan judul :*  
                   " *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMA*  
                   *NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL*"
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin penelitian berlaku untuk masa 3 ( tiga ) Bulan terhitung dari tanggal pengajuan pemberitahuan penelitian;
2. Apabila sampai pada batas waktu berlaku penelitian belum selesai, maka wajib untuk mengajukan perpanjangan-ijin penelitian;
3. Sanggup mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperfunya.

Kendal, 8 Juni 2015

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN KENDAL

Kasi Bina Politik & Hubungan Antar Lembaga



## Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Bappeda Kabupaten Kendal



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 1259 R/ Bppd

- I DASAR : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II MEMBACA : Surat dari Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/772/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : M Abid Dzulfikar
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang
- 3 Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
- 4 Penanggung jawab : Drs. Heri Yanto, MBA., PhD
- 5 Maksud / Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul : "Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri Se - Kabupaten Kendal"
- 7 Lokasi : Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
  - b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa / Kelurahan setempat.
  - c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal
- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 8 Juni 2015 s/d 8 September 2015

Dikeluarkan di : K E N D A L

Pada tanggal : 8 Juni 2015

a.n. BUPATI KENDAL  
Kepala Bappeda Kab.Kendal  
Ub. Ka. Subid Penelitian dan Pengembangan



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

Kendal, 8 Juni 2015

Nomor : 070 / 1259 / Bppd  
 Lampiran : 1 (satu) lembar  
 Perihal : Pemberitahuan  
 Pelaksanaan Ijin Penelitian  
An. M Abid Dzulfikar

Kepada Yth :  
 Sdr. Ka. Dinas Pendidikan Kab.Kendal

di  
**TEMPAT**

Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal 8 Juni 2015 No. 070/ 1259 R/Bppd (terlampir), maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengertian dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL  
 Kepala Bappeda Kab.Kendal  
 Ub. Ka. Subid Penelitian dan Pengembangan

  
**SOKERI, SH. MH**  
 Pembina  
 NIP. 19720606 199203 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peninggal.

## Lampiran 6 Surat Izin Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jl. Pramuka No.5 Kendal Telp. 0294-381457 / 381566 Fax. 0294-382440

Kendal, 11 Juni 2015

Nomor : 070 / ~~5088~~ Disdik  
 Lampiran :  
 Perihal : **REKOMENDASI PENELITIAN**

Kepada Yth.  
 Kepala SMA Negeri  
 se Kabupaten Kendal  
 di

Tempat masing-masing

Menindaklanjuti Surat Bupati Kendal Nomor : 070/1259 R/Bppd tanggal 8 Juni 2015 perihal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Penelitian, dengan ini kami berikan rekomendasi kepada :

Nama : **M ABID DZULFIKAR**  
 NIM : 7101411354  
 Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang  
 Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang

Untuk mengadakan penelitian dengan judul " **Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri se Kabupaten Kendal** "

Dengan ketentuan :

1. Kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
2. Kegiatan tersebut sebatas untuk kepentingan akademik dan tidak untuk kepentingan politik tertentu, atau dipublikasikan kepada khalayak umum.
3. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada kami.
4. Lama penelitian terhitung mulai tanggal 8 Juni 2015 s.d 8 September 2015.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan )
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kendal;
3. Rektor UNNES Semarang;
4. Sdr. M. ABID DZULFIKAR
5. Arsip

## Lampiran 7 Identifikasi Data Dokumen

No.	Sekolah	Harga Lemparang	Harga Bola Lemparang	Stava	Harga Tidak Lemparang	Alengkapan	Rendahnya
1	SMAN 1 Lambongan	Rp 1.950.455,000	Rp 779.320,000	564	Rp 1.034.000,000	Rp 1.662.250,000	Rp 1.439.335,700
2	SMAN 1 Bojonegara	Rp 3.458.525,130	Rp 1.438.271,250	825	Rp 2.706.304,757	Rp 1.331.453,249	Rp 1.239.090,749
3	SMAN 1 Singorojo						
4	SMAN 1 Patemba	Rp 349.696,800	Rp 59.137,450	111	Rp 534.365,400	Rp 152.960,000	Rp 126.002,000
5	SMAN 1 Suboroyo	Rp 2.692.068,000	Rp 1.022.945,000	725	Rp 1.641.499,600	Rp 1.208.237,342	Rp 1.137.022,342
6	SMAN 2 Suboroyo	Rp 1.203.797,600	Rp 492.217,400	344	Rp 1.066.640,857	Rp 602.965,000	Rp 510.887,000
7	SMAN 1 Rowosari	Rp 1.066.106,700	Rp 362.608,000	381	Rp 1.501.386,807	None	Rp 1.024.067,369
8	SMAN 1 Welan	Rp 3.285.115,963	Rp 2.898.187,195	821	Rp 2.883.341,500	Rp 965.712,000	Rp 944.529,367
9	SMAN 1 Gemuh	Rp 1.679.731,517	Rp 1.368.847,517	526	Rp 1.766.589,890	Rp 3.662.963,725	Rp 3.636.388,535
10	SMAN 1 Cepiring						
11	SMAN 1 Pegondan	Rp 2.388.727,990	Rp 299.485,938	760	Rp 2.191.202,878	Rp 1.772.687,300	Rp 1.276.347,006
12	SMAN 1 Kantal	Rp 4.734.585,000	Rp 756.025,000	1030	Rp 3.413.527,200	Rp 7.150.006,684	Rp 7.141.752,223
13	SMAN 2 Kantal	Rp 2.445.226,700	Rp 1.677.269,000	698	Rp 2.202.927,517	Rp 2.883.069,257	Rp 2.790.669,950
14	SMAN 1 Karanganyar	Rp 3.086.942,486	Rp 891.301,600	861	Rp 2.393.083,908	Rp 5.308.040,896	Rp 5.390.409,674

PAS	Belanja Operasi	Total Pendapatan	Total Belanja	SPP Rata-rata Tahun Berjalan	SPT Rata-rata Tahun Berjalan (pembulatan)	Gaji PNS	BTL yang akan dibiayai SP
Rp 1,022,099,500	Rp 1,439,335,700	Rp 2,596,099,500	Rp 2,473,335,700	Rp 135,000	Rp 715,452	Rp 1,034,000,000	Rp 2,076,480
Rp 2,084,388,974	Rp 2,864,507,594	Rp 2,867,388,974	Rp 2,864,507,594	Rp 168,750	Rp 1,047,273	Rp 2,706,304,757	Rp 2,448,793
Rp 126,102,000	Rp 219,346,000	Rp 214,102,000	Rp 219,346,000	Rp 170,000	Rp 726,892	Rp 433,634,400	Rp 2,617,652
Rp 1,137,112,342	Rp 1,821,125,467	Rp 1,862,112,342	Rp 1,821,125,467	Rp 130,000	Rp 672,828	Rp 1,641,499,600	Rp 2,302,239
Rp 510,887,000	Rp 909,980,800	Rp 854,887,000	Rp 909,980,800	Rp 130,000	Rp 887,180	Rp 973,530,857	Rp 2,068,547
Rp 1,021,670,069	Rp 1,390,353,650	Rp 1,402,670,069	Rp 1,390,353,650	Rp 140,000	Rp 614,646	Rp 1,274,924,807	Rp 2,109,157
Rp 2,439,253,000	Rp 3,261,160,870	Rp 3,260,253,000	Rp 3,261,160,870	Rp 153,110	Rp 1,249,666	Rp 2,539,157,500	Rp 836,698
Rp 1,586,289,727	Rp 2,243,677,085	Rp 3,656,388,535	Rp 3,654,275,893	Rp 125,000	Rp 745,913	Rp 1,548,427,010	Rp 591,034
Rp 1,276,347,006	Rp 2,358,521,520	Rp 1,972,347,006	Rp 2,358,521,520	Rp 120,000	Rp 899,250	Rp 1,839,208,878	Rp 2,749,003
Rp 3,513,000,000	Rp 3,871,239,423	Rp 7,150,006,864	Rp 7,141,752,223	Rp 227,063	Rp 1,756,311	Rp 2,419,357,200	Rp 3,862,680
Rp 2,103,659,950	Rp 2,792,041,488	Rp 2,781,659,950	Rp 2,792,041,488	Rp 150,395	Rp 1,098,567	Rp 1,796,844,517	Rp 1,100,226
Rp 2,603,644,778	Rp 3,846,698,647	Rp 5,390,409,674	Rp 5,387,405,047	Rp 150,000	Rp 1,039,077	Rp 1,540,706,400	Rp 2,666,250

## Lampiran 8 Perhitungan Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Pendidikan

## Sumber Dana Pendidikan

Sekolah	Struktur Sumber Dana						Jumlah
	APBN	APBD provinsi	APBD Kabupaten	Lain-lain	Masyarakat (Orangtua/Wali)		
SMAN 1 Limbangan	Rp 564,000,000	Rp 3,500,000	Rp 1,034,000,000	Rp -	Rp 1,382,955,000	Rp 2,984,455,000	
SMAN 1 Boja	Rp 825,000,000	Rp -	Rp 2,706,304,757	Rp -	Rp 2,633,525,130	Rp 6,164,829,887	
SMAN 1 Patean	Rp 544,634,400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 339,427,800	Rp 884,062,200	
SMAN 1 Sukorejo	Rp 725,000,000	Rp 8,404,500	Rp 1,641,499,600	Rp -	Rp 1,958,663,500	Rp 4,333,567,600	
SMAN 2 Sukorejo	Rp 344,000,000	Rp 51,916,000	Rp 973,530,857	Rp -	Rp 900,991,600	Rp 2,270,438,457	
SMAN 1 Rowosari	Rp 384,600,000	Rp -	Rp 1,274,924,807	Rp -	Rp 1,007,058,700	Rp 2,666,583,507	
SMAN 1 Weluri	Rp 821,000,000	Rp 8,704,350	Rp 2,439,157,500	Rp -	Rp 3,199,595,613	Rp 6,468,457,463	
SMAN 1 Gemuh	Rp 526,000,000	Rp 61,500,000	Rp 1,551,877,010	Rp -	Rp 1,306,944,397	Rp 3,446,321,407	
SMAN 1 Pegandon	Rp 760,000,000	Rp 76,525,000	Rp 1,839,208,878	Rp -	Rp 1,904,196,990	Rp 4,579,930,868	
SMAN 1 Kendal	Rp 3,449,357,200	Rp 75,000,000	Rp -	Rp -	Rp 4,623,755,000	Rp 8,148,112,200	
SMAN 2 Kendal	Rp 698,000,000	Rp -	Rp 1,796,844,517	Rp -	Rp 2,153,309,700	Rp 4,648,154,217	
SMAN 1 Kaliwungu	Rp 907,574,459	Rp 4,752,000	Rp 1,958,083,908	Rp -	Rp 2,706,611,400	Rp 5,580,026,394	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10,549,166,059</b>	<b>Rp 290,301,850</b>	<b>Rp 17,215,431,834</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 24,117,034,830</b>	<b>Rp 52,171,934,573</b>	
<b>Persentase</b>	<b>20,22%</b>	<b>0,56%</b>	<b>33,00%</b>	<b>-</b>	<b>46,23%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>Rp 879,097,172</b>	<b>Rp 24,191,821</b>	<b>Rp 1,434,619,320</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,009,752,903</b>	<b>Rp 4,347,661,214</b>	

## Penggunaan Dana Pendidikan

Sekolah	Belanja Langsung										Jumlah
	Gaji PNS	Belanja Program									
		Administrasi, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Aparatur, Pelayanan Kinerja Aparatur Pemerintah	Ketenagakerjaan	Kurikulum	Kesiswaan	Sarana dan Prasarana	Humas dan Kemitraan	Manajemen			
SMAN 1 Limbungan	Rp 1.034,000,000	Rp 893,296,000	Rp 65,000,000	Rp 339,201,000	Rp 89,780,000	Rp 429,590,000	Rp 112,373,000	Rp 21,215,000	Rp 2,984,455,000		
SMAN 1 Boja	Rp 2.706,304,757	Rp 1,438,271,250	Rp 20,500,000	Rp 417,342,000	Rp 509,722,925	Rp 921,858,955	Rp 106,000,000	Rp 44,830,000	Rp 6,164,829,887		
		Rp -							Rp -		
SMAN 1 Paten	Rp 433,634,400	Rp 101,797,450	Rp 64,311,000	Rp 109,011,850	Rp 126,866,700	Rp 28,828,000	Rp 13,626,000	Rp 5,986,800	Rp 884,062,200		
SMAN 1 Sukorejo	Rp 1,641,499,600	Rp 783,244,000	Rp 49,535,000	Rp 596,657,800	Rp 309,950,000	Rp 888,381,100	Rp 3,200,000	Rp 61,100,100	Rp 4,333,567,600		
SMAN 2 Sukorejo	Rp 973,530,857	Rp 443,222,673	Rp 139,224,627	Rp 185,446,000	Rp 142,642,000	Rp 124,958,200	Rp 155,104,000	Rp 106,310,000	Rp 2,270,488,357		
SMAN 1 Rowosari	Rp 1,274,924,807	Rp 299,498,000	Rp 264,897,000	Rp 227,860,200	Rp 102,505,500	Rp 344,669,700	Rp 41,609,000	Rp 110,619,300	Rp 2,666,583,507		
SMAN 1 Welri	Rp 2,539,157,500	Rp 684,924,243	Rp 474,933,600	Rp 720,897,000	Rp 422,559,066	Rp 1,301,317,127	Rp 213,744,400	Rp 107,920,000	Rp 6,468,457,463		
SMAN 1 Gemuh	Rp 1,548,427,010	Rp 310,884,000	Rp 309,876,380	Rp 281,044,015	Rp 291,682,005	Rp 609,927,997	Rp 87,120,000	Rp 7,360,000	Rp 3,446,321,407		
		Rp -							Rp -		
SMAN 1 Pegundon	Rp 1,839,208,878	Rp 299,485,938	Rp 427,594,000	Rp 526,307,307	Rp 309,568,195	Rp 909,421,200	Rp 99,299,050	Rp 169,046,300	Rp 4,579,990,868		
SMAN 1 Kendal	Rp 2,419,357,200	Rp 756,025,000	Rp 1,155,420,000	Rp 543,180,000	Rp 1,123,665,000	Rp 1,509,425,000	Rp 197,000,000	Rp 444,040,000	Rp 8,148,112,200		
SMAN 2 Kendal	Rp 1,796,844,517	Rp 295,789,600	Rp 406,083,000	Rp 570,525,700	Rp 336,225,000	Rp 1,054,160,700	Rp 52,000,000	Rp 136,525,700	Rp 4,648,154,217		
SMAN 1 Kaliwungu	Rp 1,540,706,400	Rp 856,301,600	Rp 525,300,000	Rp 400,665,486	Rp 776,157,900	Rp 1,242,895,000	Rp 183,000,000	Rp 55,000,000	Rp 5,580,026,394		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19,747,595,916</b>	<b>Rp 7,162,735,754</b>	<b>Rp 3,902,674,607</b>	<b>Rp 4,918,138,338</b>	<b>Rp 4,541,324,291</b>	<b>Rp 9,365,483,979</b>	<b>Rp 1,264,075,450</b>	<b>Rp 1,269,953,200</b>	<b>Rp 52,171,934,573</b>		
Persentase	38%	14%	7%	9%	9%	18%	2%	2%	100%		
Rata-rata	Rp 1,645,632,994	Rp 596,894,980	Rp 325,222,884	Rp 409,844,863	Rp 378,443,691	Rp 780,452,748	Rp 105,339,621	Rp 105,829,433	Rp 4,347,661,214		

## Lampiran 9 Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 1 KALIWUNGU**

Alamat : Jl. Pangeran Juminah Kaliwungu – Kendal Telp. (0294) 382567  
 e-mail : [smakaliwungu@yahoo.co.id](mailto:smakaliwungu@yahoo.co.id) Website : [www.sman1kaliwungu.co.cc](http://www.sman1kaliwungu.co.cc)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 270 / SMAN 1 Kaliwungu

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama : **Hj. PUJI HASTUTI, S.Pd, M.Si, M.Pd.**  
 NIP : 19630607 198703 2 005  
 Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :  
 Nama Lengkap : **M. ABID DZULFIKAR**  
 NPM : 7101411354  
 Jurusan / Konsentrasi : Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi

Orang tersebut diatas telah mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 Kaliwungu Kendal pada tanggal 24 Juni 2015 dalam rangka mengadakan penelitian dengan judul : “ **Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Kaliwungu, 24 Juni 2015  
 Kepala Sekolah,  
  
**Hj. PUJI HASTUTI, S.Pd, M.Si, M.Pd.**  
 Pembina  
 NIP. 19630607 198703 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 ROWOSARI**

Jl. Bahari KM. 5 Rowosari Kendal Telp. (0294) 642 860 / (0294) 644 369  
E-mail : smanrowosari@yahoo.co.id Http:// smanrowosarionline.wordpress.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 421.3/140/ SMA 1 Rowosari

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyudi, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19551222 198503 1 009  
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SMA N 1 Rowosari  
Alamat : Jl Bahari Km 5 Rowosari Telp (0294) 642860

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : M. ABID DZULFIKAR  
NIM : 7101411354  
Fak/ Program Studi : Pendidikan Ekonomi/ Pendidikan Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa UNNES

Telah melaksanakan Penelitian di SMAN 1 Rowosari dengan judul " Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



NIP 19551222 198503 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 1 WELERI**  
Alamat : Jln. Bahari No. 17 Weleri – Kendal, Telp. (0294) 641390,  
E-mail : sman1weleri@yahoo.co.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.4 / 258.a / SMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Weleri Kabupaten Kendal menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : M. ABID DZULFIKAR  
NIM : 7101411354  
Fak / Prodi : FAKULTAS EKONOMI / PENDIDIKAN EKONOMI  
Univeritas : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yang bersangkutan telah melaksanakan **Observasi / Penelitian** tentang **Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah** di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal , pada tanggal 20 Juni 2015, jam: 09.30 WIB.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Weleri, 20 Juni 2015



NOOR MOHAMAD ABIDUN, S.Pd., M.Si.  
DINAS PENDIDIKAN NO. 9610619 198503 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 LIMBANGAN**

Jl Raya Limbangan No. 1 Telp. (0294) 3673032 Fax (0294) 3673255  
Kode Pos : 51383  
Email : sma1limbangan@yahoo.co.id  
K E N D A L

NSS : 301032406023

NPSN : 20321853

NIS : 300220

**SURAT KETERANGAN**

No. 422 / 142 / SMA1 / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Noor Afif  
NIP : 19640930 198903 1 006  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMA Negeri 1 Limbangan  
Kabupaten Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. ABID DZULFIKAR  
No. Induk : 7101411354  
Jurusan : Pendidikan Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-  
Kabupaten Kendal

Benar-benar telah mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 Limbangan Kab. Kendal pada tanggal 23 Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Kendal, 23 Juni 2015  
Kepala SMA Negeri 1 Limbangan,  
  
Noor Afif  
NIP. 19640930 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 1 KENDAL**  
Jl. Soekarno Hatta ☎ (0294) 381136 - ✉ (0294) 381136 Kotak Pos.11 Kendal  
✉ : sma1kdl@gmail.com web : sma1kendal.sch.id



Certificate Number :  
16Q19954

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423 / 261 / SMA.1.Kdl

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19700529 199301 1 002  
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina-IV/a  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMA Negeri 1 Kendal

Menerangkan bahwa :

Nama : M. AbidZulfikar  
NIM : 7101411354  
Jurusan / Konsentrasi : PendidikanEkonomi / Pendidikan Akuntansi  
Mahasiswa : UniversitasNegeri Semarang (UNNES)

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal " Pada Bulan Juni 2015.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kendal, 15 Juni 2015  
Kepala SMA Negeri 1 Kendal

  
Sunarto, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700529 199301 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 2 SUKOREJO**  
 Jalan Lingkar Utara Kebumen Sukorejo Kendal 51363 Telp. (0294) 452030  
 Email : smandaskri@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

No. / /SMA2/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Bagiyo Santoso  
 NIP : 19581208 198603 1 014  
 Jabatan : Kepala Sekolah  
 Unit Kerja : SMA Negeri 2 Sukorejo  
 Kabupaten Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. ABID DZULFIKAR  
 NIM : 7101411354  
 Jurusan : Pendidikan Ekonomi  
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang  
 Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-  
 Kabupaten Kendal

Benar-benar telah mengadakan penelitian di SMA Negeri 2 Sukorejo Kab. Kendal pada tanggal 12 Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 12 Juni 2015

Kepala SMA Negeri 2 Sukorejo,

  
 Drs. Bagiyo Santoso  
 NIP. 19581208 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN

**SMA NEGERI 1 SUKOREJO**

Terakreditasi " A "

Jalan Banaran 5 Sukorejo, Kendal Telepon/Fax ( 0294 ) 451091 Kode Pos 51363  
Email : sma1sukorejo@yahoo.co.id; Website : www.sman1sukorejo.sch.id

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 070 / 372/ SMA

Dasar surat dari Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Semarang Nomor 1609/UN37.1.7/PP/2015 Tanggal 8 Juni 2015 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Nomor 070/5088/Disdik Tanggal 11 Juni 2015, Kepala SMA Negeri 1 Sukorejo,  
nama : Drs. Budi Wahono, M.Pd.  
pangkat/gol. ruang : Pembina Tk. 1 / IV/b  
jabatan : Kepala Sekolah  
dengan ini menerangkan bahwa  
nama : M. Abid Dulfikar  
N I M : 7101411354  
pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang  
maksud : bahwa Yang bersangkutan pada bulan Juni 2015 benar-benar telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Sukorejo dengan judul "*Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri se Kabupaten Kendal*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 20 Agustus 2015

Kepala Sekolah



**Drs. Budi WAHONO, M.Pd.**

Pembina Tk. 1

NIP. 19590420 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA N 1 PATEAN**

Jl. Selo Dsn. Rowosari Ds. Curugsewu Kec. Patean. Telp. (0294) 452 960  
E-mail : sma\_patean@yahoo.com  
Kode Pos. 51364 KENDAL

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 441.7/264 / SMA 1 Ptr/ 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patean Kendal, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M ABID DZULFIKAR  
NIM : 7101411354  
Program Study : PENDIDIKAN EKONOMI  
Universitas : UNNES

Telah melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Patean Kendal, dengan judul penelitian :

' ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL '

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Patean, 20 Agustus 2015  
Kepala Sekolah  
Waka Supras  
SMA 1  
PATEAN  
Sri Muijati, S.P  
NIP. 1962062007012008



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 1 BOJA**  
Jalan Raya Bebengan No. 203 D. Telp. (0294) 571089 Fax. (0294) 572063  
Website : smansaboja.sch.id Email : mail@smansaboja.sch.id  
KENDAL



Kode Pos : 51381

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421/ 957 /SMANI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMA Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : M. ABID DZULFIKAR
2. N P M : 7101411354
3. Jurusan : Pendidikan Ekonomi  
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian "**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL**", yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Boja, 20 Agustus 2015  
An. Kepala Sekolah  
Kepala Tata Usaha,

M. AZANAH, S.Pd.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650812 198609 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 2 KENDAL**

Alamat : Kelurahan Jetis Kec. Kota Kendal Kabupaten Kendal  
Tlp. ( 0294 ) 383048, 381028 Fax. (0294) 381028 Kode Pos. 51315  
Website: [www.smanegeri2kendal.sch.id/](http://www.smanegeri2kendal.sch.id/) e-mail: [smanda.kendal@gmail.com](mailto:smanda.kendal@gmail.com)



**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : 041 / 370

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNIASIH, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19640622 198703 2 007  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMA Negeri 2 Kendal

Menerangkanbahwa :

Nama : M. AbidDzulfikar  
NIM : 7101411354  
Jurusan / Program : FakultasEkonomi (Akuntansi) UniversitasNegeri Semarang

TelahmelaksanakanPenelitian di SMA Negeri 2 Kendal denganjudul : "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KENDAL". Padatanggal 13 Juni 2015.

Demikiansumtini dibuat agar dapatdigunakansebagaimanamestinya.

Kendal, 15 Juni 2015  
Kepala Sekolah  
  
YUNIASIH, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19640622 198703 2 007